



Media Monitoring Report	
Media: SEPUTAR INDONESIA	Date: Friday, February 15, 2008
Page: 20	Section: Seputar DIY
Value :	
Tone : positive negative neutral	
Title : JRF ancam tarik bantuan	

JRF Ancam Tarik Bantuan

Jika Terbukti Manipulasi Data Diminta Kembalikan

YOGYAKARTA (SINDO)–Java Reconstruction Fund (JRF) memastikan akan menarik bantuannya kembali jika terbukti ada pemalsuan data.

JRF akan menarik kembali bantuan yang diberikan jika aturan main yang telah disepakati sebelumnya terbukti dilanggar. "Saya rasa dalam aturan manapun kalau ada orang yang memberikan informasi yang tidak benar, harus membayar kembali uang yang telah diterimanya. Kita akan melaksanakannya jika memang ada bukti konkrit," tegas Ketua Tim Technical Leader JRF George Soraya usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, kemarin.

Menurut dia, hal tersebut

sudah sesuai dengan aturan pengeluaran dana di negara manapun. Namun demikian, pihaknya memastikan belum turunnya dana JRF tahap ketiga ini bukan disebabkan oleh hasil penelitian Lembaga Ombudsman Swasta (LOS). Belum turunnya dana ini lebih disebabkan persoalan administrasi saja. "Pencairan dana tetap berjalan tinggal menunggu proses administrasi saja," ujarnya.

Tetap turunnya dana JRF tahap ketiga ini juga dipastikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia memastikan pencairan dana JRF tidak

terpengaruh dengan hasil penelitian LOS seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat Bantul. "Semua sudah *clear*. Dana JRF tetap turun," tegasnya.

Disinggung soal kendala pencairan dana JRF tahap ketiga tersebut, menurut dia, hal itu terkait dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "*Lha DIPA-ne* belum sampai di sini. Jadi ya belum turun," tukasnya. Saat ditanya lebih jauh kapan DIPA ini akan turun, dia mengaku tidak tahu. Alasannya, hal itu kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu pihak LOS diminta untuk membuat laporan tertulis kepada Gubernur terkait kronologis perusakan oleh massa pada Senin (11/2) lalu. "Kita diminta membuat laporan tertulis. Karena gu-

bernurakan mengambil sikap setelah kami membuat laporan tertulis," terang Ketua LOS DIY Budi Wahyuni usai bertemu dengan Sultan.

Sedangkan menyangkut langkah hukum yang ditempuh LOS terkait aksi perusakan yang menimpa kantornya, menurut dia, dalam pembicaraan tersebut pihaknya menangkap bahwa Sultan mendukung langkah tersebut. "Menurut pemahaman saya dalam dialog yang kami gelar, beliau sangat mendukung langkah kami termasuk independensi kami," terangnya.

Usai bertemu dengan Sultan, LOS DIY kemudian memenuhi undangan Komisi A DPRD DIY. Dalam pertemuan tersebut Komisi A menyarankan agar kelak keberadaan

LOS dan LOS bisa dibuat Perda tidak hanya sekadar SK Gubernur agar keberadaan mereka semakin kuat. Dalam pertemuan tersebut beberapa anggota komisi juga mempertanyakan aksi anarkis yang dilakukan oleh massa dari Bantul ini. "Mereka ini yang menyuruh siap. Jangan-jangan ini hanya *test case* untuk kepentingan politik yang lebih jauh," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DIY Takdir Ali Mukti.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD Noor Haris juga mengkritik aksi massa dari Bantul ini. "Hasil penelitian itu tidak sama dengan gelombang cinta yang setiap saat bisa dicabut," selorohnya disambut tawa hadirin yang lain.

(ainun najib)